QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang:
- a. bahwa Koperasi sebagai badan, Usaha dan gerakan ekonomi kerakyatan turut berperan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibangun atas dasar ta'awun (saling membantu) berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa koperasi mempunyai kedudukan sebagai sokoguru dan bagian internal dari tata perekonomian Indonesia, MUM mampu berfungsi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat dalam Upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
 - c. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 memberikan kesempatan yang lebih luas kepada rakyat Aceh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, melindungi sumber ekonomi, menggalang dan memimplementasikan tata ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan nilai kehidupan masyarakat Aceh yang Islami;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Pemberdayaan Koperasi.

- Mengingat :
1. Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-undang, Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang

Usaha Kecil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3539);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor IS Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengesahan Akta Pendidikan dan Pengesahan Anggaran Dasar Koperasi serta Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Sampan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai daerah Otonomi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54).

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM
dan
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1 pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
- 2 Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 3 Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 4 Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan pengusaha kecil menengah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 5 Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
- 6 Pemberdayaan adalah kegiatan dan atau upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi gerakan koperasi (DEKOPIN) dan masyarakat dalam upaya menumbuhkan iklim usaha, peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha serta kelembagaan, sehingga koperasi tumbuh berkembang menjadi perusahaan yang tangguh dan mandiri.
- 7 Koperasi adalah Badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang beranggotakan orang, seorang atau Badan hukum Koperasi berdasarkan asas kekeluargaan (ta'awwun) dan pada prinsip-prinsip koperasi.
- 8 Gerakan Koperasi adalah keseluruhan Organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.
- 9 Koperasi Primer adalah Ko^Perasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, sedikitnya 20 (dua puluh) orang berdasarkan kepentingan ekonomi yang sama.
- 10 Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan sedikitnya 3 (tiga) buah koperasi primer dalam satu atau beberapa wilayah atas dasar kepentingan usaha dan kerjasama ekonomi.
- 11 Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) adalah organisasi tunggal gerakan koperasi Indonesia yang bersifat Idiil dan otonom, wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai

pembawa aspirasi koperasi. Pada tingkat Provinsi disebut Dekopin Wilayah dan pada tingkat Kabupaten/Kota disebut Dekopin Daerah.

BAB II

PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA KOPERASI

Bagian Pertama

Peningkatan Kualitas SDM

Pasal 2

- (1) Dalam upaya peningkatan kualitas anggota, koperasi menyelenggarakan pendidikan perkoperasian dan pelatihan bidang usaha bagi anggotanya setup tahun kerja.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan perkoperasian, koperasi berkerjasama dengan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) sebagai wadah penyalur aspirasi dan pembinaan gerakan koperasi atau dengan pihak-pihak ketiga lainnya.
- (3) Setiap koperasi memprogramkan, menyediakan dana memanfaatkan dana pendidikan dari akumulasi Sisa Hasil Usaha (SHU).
- (4) Setiap Lembaga Pendidikan formal dapat memberikan mata pelajaran perkoperasian sebagai 111Liatall lokal dan disesuaikan dengan penyelenggaraan otonomi ULISUS dan pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 3

- (1) Modal Koperasi dapat berasal dari modal sendiri, modal pinjaman dan bantuan perkuatan modal dari Pemerintah dan BUMN/BUMD serta pihak ketiga yang sah.
- (2) Dalam upaya pemberdayaan koperasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi koperasi untuk memperoleh modal dari lembaga keuangan dan pihak- swasta lainnya.
- (3) Bantuan permodalan kepada koperasi yang diperuntukan sebagai pengembangan usaha baik modal kerja maupun investasi yang berasal dari Pemerintah Provinsi atau kabupaten/Kota, dapat diberikan kepada koperasi yang cukup sehat.
- (4) Dalam rangka memperoleh dukungan dan fasilitasi permodalan koperasi, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, memfasilitasi pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD).

Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan usaha, koperasi dapat mengangkat seorang manajer atau lebih, baik dari kalangan pengurus, anggota atau dari pihak lainnya.

- (2) Hubungan antara pengurus dengan manajer berdasarkan kontrak kerja dan berstatus sebagai karyawan.
- (3) Apabila diperlukan untuk kepentingan usaha, manajer dapat mengangkat karyawan atas dasar kontrak kerja setelah mendapat pertimbangan dari pengurus.

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan manajemen Koperasi dilakukan oleh pengawas yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada rapat anggota.
- (2) Bagi pengawas yang pada saat dipilih, tidak mempunyai kemampuan di bidang pengawasan atau akuntansi koperasi, wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan untuk itu.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pengawasan dan pelaporan secara berkala tiga kali dalam setahun.

Pasal 6

- (1) Bagi koperasi yang mendapat pinjaman atau bantuan modal atau donasi atau fasilitas Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan atau pihak ketiga, wajib menggunakan jasa akuntan publik dari koperasi jasa audit atau angkutan publik lainnya dalam penyusunan laporan tahunan dan disampaikan dalam rapat anggota.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan (Audit) oleh jasa audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) patut diduga telah terjadi penyalahgunaan Kewenangan atau keuangan yang merugikan koperasi, maka pelaksanaan jasa audit wajib menyampaikan laporannya kepada pengurus dan tembusannya disampaikan kepada pengawas, dan Dinas Koperasi untuk dipupayakan penyelesaiannya.
- (3) Dalam hal upaya penyelesaian untuk menyelamatkan harta/keuangan koperasi tidak berhasil, maka di tempuh upaya penyelesaiannya menurut prosedur hukum yang berlaku.

BAB III

PEMBERDAYAAN BIDANG USAHA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dapat memberi peluang bidang Usaha tertentu dilakukan oleh Koperasi.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dan Pengusaha menengah ke atas, ditugaskan memfasilitasi Pemberdayaan koperasi sebagai mitra usaha,
- (3) Setiap anggota koperasi memanfaatkan bidang usaha koperasi dimana ia menjadi anggota atau koperasi lainnya.